



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM
(*EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk mencegah dampak negatif tersebut diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan;
- d. bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*);

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (*EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Viet Nam, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Hukum,




Nurul Huda Purwanti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM
(*EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*)

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (*borderless*), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain.

Di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga membawa dampak negatif yang bersifat transnasional yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sama antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral.

Menyadari . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah sepakat mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), diharapkan semakin meningkat.

Saat ini Indonesia telah memiliki 6 (enam) Undang-Undang yang mengesahkan perjanjian bilateral mengenai Ekstradisi dan 1 (satu) Undang-Undang yang mengesahkan perjanjian bilateral mengenai perjanjian untuk penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri. Ketujuh Undang-Undang tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*);

6. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (*Treaty on Extradition between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea*); dan
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*).

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain:

- a. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini;
- b. suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat;
- c. suatu tindak pidana dapat diekstradisikan, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta, apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Pihak Peminta;

d. Ekstradisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi adalah tindak pidana politik;
- e. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
- f. tidak satu Pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya menurut Perjanjian ini;
- g. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan Ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya;
- h. orang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada Pihak Peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaan Ekstradisinya dikabulkan, ataupun orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali:
 - 1. Pihak Diminta telah menyetujui sebelumnya;
 - 2. orang tersebut belum meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut;
 - 3. setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan Ekstradisinya, selain tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya.
- i. orang yang dimintakan Ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum Pihak Peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan.

II. Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5673



REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN EKSTRADISI
ANTARA
REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM
DAN
REPUBLIK INDONESIA**

Republik Sosialis Viet Nam dan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”);

Berkeinginan mengadakan kerja sama yang lebih efektif antara kedua negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan berdasarkan saling penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1

KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EKSTRADISI

Tiap-tiap Pihak sepakat untuk melakukan ekstradisi kepada Pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan hukum domestiknya masing-masing, setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 2

TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN

1. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.
2. Suatu tindak pidana juga merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut meliputi suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, pembantuan atau penganjuran, pemberian nasihat atau pemberian kesempatan, atau penyertaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada Ayat 1 pasal ini.
3. Menurut Pasal ini, dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi persoalan apakah hukum kedua Pihak menempatkan perbuatan yang dituduhkan terhadap buronan tersebut dalam golongan tindak pidana yang sama atau menyebutkan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama. Keseluruhan perbuatan yang dituduhkan akan dipertimbangkan terlepas adanya perbedaan unsur-unsur dasar tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya.
4. Apabila permintaan ekstradisi meliputi sejumlah tindak pidana dan beberapa di antaranya tidak dapat dihukum dengan pidana penjara untuk jangka waktu paling sedikit satu tahun berdasarkan hukum kedua Pihak, ekstradisi dapat dikabulkan untuk semua tindak pidana apabila memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan termasuk pengabulan ekstradisi untuk sekurang-kurangnya satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan.
5. Dalam hal ekstradisi dimintakan terhadap seseorang untuk suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau masalah-masalah penghasilan lainnya, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan

alasan bahwa hukum dari Pihak Diminta tidak menerapkan jenis pajak atau bea yang sama atau tidak mengatur ketentuan-ketentuan pajak, bea cukai, atau pertukaran valuta asing yang serupa dengan hukum di Pihak Peminta.

6. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Perjanjian ini, suatu tindak pidana dapat diekstradisikan, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta, apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Pihak Peminta.
7. Apabila permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk melaksanakan hukuman yang telah diputuskan, sisa masa hukuman yang harus dijalani untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan tersebut tidak kurang dari enam bulan.

PASAL 3

PENOLAKAN EKSTRADISI

1. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila:
 - a. tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana politik;
 - b. Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau berdasarkan alasan-alasan tersebut, orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilanannya;
 - c. tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;



REPUBLIK INDONESIA

- d. orang yang dimintakan ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum Pihak Peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan;
 - e. putusan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan kepada orang yang diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
 - f. tindak pidana yang dimintakan ekstradisi diancam dengan hukuman pidana mati berdasarkan hukum Pihak Peminta, sedangkan berdasarkan hukum Pihak Diminta, tindak pidana tersebut tidak diancam dengan hukuman pidana mati, kecuali Pihak Peminta menjamin bahwa apabila orang yang diminta tersebut dijatuhi pidana mati, pemedanaannya tidak akan dilaksanakan.
2. Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:
- a. tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau keluarga inti;
 - b. tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal Para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut, untuk melakukan ekstradisi atau melakukan penuntutan terhadap orang yang diminta atau menyerahkan perkara tersebut tanpa penundaan kepada otoritas yang berwenang untuk tujuan penuntutan;
 - c. tindak pidana terkait terorisme yang pada saat permintaan diajukan, berdasarkan hukum Pihak Diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat politik;
 - d. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada

seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.

3. Tindak pidana berat terhadap tubuh, orang, nyawa dan harta benda, walaupun bermuatan politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik menurut Perjanjian ini.
4. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya. Dalam keadaan tersebut, Pihak Diminta memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku ke Pengadilan atas tindak pidana yang diajukan ekstradisinya sesuai dengan hukum nasionalnya. Dalam hal otoritas berwenang dari Pihak Diminta memutuskan untuk tidak menuntut atau apabila penuntutan tidak dapat dilaksanakan karena atas alasan apa pun, maka permintaan ekstradisi harus dipertimbangkan kembali.
5. Apabila, dalam keadaan tertentu, Pihak Diminta dengan mempertimbangkan keseriusan tindak pidana dan kepentingan Pihak Peminta, beranggapan bahwa, karena keadaan pribadi orang yang diminta, ekstradisi tidak sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan.

PASAL 4

WARGA NEGARA

1. Tidak satu Pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya menurut Perjanjian ini.
2. Apabila ekstradisi ditolak hanya berdasarkan kewarganegaraan orang yang diminta dan yang bersangkutan dicari untuk menjalani penuntutan di Pihak Peminta, Pihak Diminta, atas permintaan Pihak Peminta, menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas Pihak Diminta untuk menjalani penuntutan.

3. Menurut pasal ini, kewarganegaraan orang yang dicari tersebut harus ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya pada saat tindak pidana yang dimintakan ekstradisi itu dilakukan.

PASAL 5
OTORITAS PUSAT

1. Tiap-tiap Pihak harus menunjuk otoritas pusat untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Untuk Republik Indonesia, otoritas pusat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk Republik Sosialis Viet Nam, adalah Kementerian Keamanan Publik.

PASAL 6
PERMINTAAN EKSTRADISI DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Suatu permintaan ekstradisi dan seluruh komunikasi terkait dengan ekstradisi tersebut disampaikan melalui otoritas pusat salah satu Pihak kepada otoritas pusat Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.
2. Setiap permintaan ekstradisi harus disertai dengan:
 - a. deskripsi tentang orang yang dicari, termasuk nama, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, dokumen identifikasi lainnya, dan jika ada, pekerjaan, kemungkinan lokasi orang yang diminta, ciri-ciri fisik, foto, sidik jari orang dimaksud apabila tersedia serta informasi lainnya yang dapat membantu untuk mengidentifikasi dan menemukan orang dimaksud;
 - b. keterangan singkat mengenai fakta-fakta perkara, uraian tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya, termasuk waktu dan tempat dilakukannya

tindak pidana, dan ancaman hukuman yang ditetapkan menurut ketentuan hukum;

- c. naskah ketentuan hukum yang menetapkan adanya tindak pidana dan ancaman hukumannya, serta ketentuan hukum mengenai daluwarsa untuk penuntutan atau pelaksanaan hukuman atas tindak pidana tersebut.
3. Apabila permintaan ekstradisi dimaksud untuk tujuan penuntutan, permintaan tersebut harus disertai dengan: surat penahanan dari pengadilan atau otoritas berwenang lainnya; surat dakwaan atas tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa; dan bukti terkait yang dapat membenarkan penuntutan atas terdakwa tersebut .
 4. Apabila permintaan ekstradisi dimaksud untuk tujuan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang diminta, permintaan tersebut harus disertai dengan sebuah salinan resmi putusan pengadilan yang final dan pernyataan mengenai masa hukuman yang telah dijalani dan masa hukuman yang masih harus dijalani.
 5. Suatu permintaan ekstradisi berdasarkan Perjanjian ini harus ditandatangani dan dibubuhi segel secara resmi oleh otoritas berwenang Pihak Peminta.
 6. Permintaan ekstradisi dan seluruh komunikasi terkait dengan ekstradisi tersebut harus dibuat dalam bahasa Inggris.

PASAL 7

INFORMASI TAMBAHAN

Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang disampaikan untuk mendukung permintaan ekstradisi tidak cukup untuk mempertimbangkan permintaan tersebut, Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan tersebut untuk disampaikan dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan permintaan informasi tambahan tersebut atau dalam jangka waktu yang disepakati Para Pihak.

PASAL 8

PENYERAHAN SUKARELA

Selama proses persidangan ekstradisi, apabila orang yang diminta menyatakan di hadapan pengadilan bahwa orang tersebut secara sukarela bersedia untuk diserahkan kepada Pihak Peminta, sesuai dengan hukum nasional Pihak Diminta, Pihak Diminta dapat menyerahkan orang tersebut secepat mungkin tanpa melanjutkan proses persidangan ekstradisi tersebut.

PASAL 9

PENAHANAN SEMENTARA

1. Dalam keadaan mendesak, salah satu Pihak dapat mengajukan kepada Pihak lainnya permintaan penahanan sementara terhadap seorang buronan untuk kepentingan ekstradisi sebelum permintaan ekstradisi secara resmi disampaikan. Permintaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis melalui saluran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini, *International Criminal Police Organization* – INTERPOL, atau saluran komunikasi lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Permintaan penahanan sementara harus memuat informasi sebagaimana tertera dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini, pernyataan bahwa telah dikeluarkan surat perintah penangkapan, dan pernyataan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas orang yang dimintakan tersebut akan disampaikan setelah adanya penahanan sementara.
3. Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta mengenai hasil permintaan penahanan sementara.

4. Seseorang yang ditahan sementara harus dibebaskan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari masa penahanannya, otoritas berwenang Pihak Diminta belum menerima permintaan resmi ekstradisi.
5. Dibebaskannya orang berdasarkan ayat (4) pasal ini tidak boleh menghalangi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi orang dimaksud jika Pihak Diminta telah menerima permintaan resmi ekstradisi.

PASAL 10

KEPUTUSAN ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI

1. Pihak Diminta harus mempertimbangkan permintaan ekstradisi yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya, dan harus segera memberitahukan keputusannya kepada Pihak Peminta.
2. Apabila Pihak Diminta menolak seluruh atau sebagian dari permintaan ekstradisi tersebut, alasan-alasan penolakan harus diberitahukan kepada Pihak Peminta.

PASAL 11

PENYERAHAN

1. Apabila permintaan ekstradisi telah dikabulkan oleh Pihak Diminta, para Pihak harus menyepakati waktu, tempat dan hal-hal relevan lainnya terkait dengan penyerahan orang yang diminta. Pihak Diminta harus memberitahu Pihak Peminta mengenai jangka waktu penahanan yang telah dijalani orang yang dicari sebelum dilakukannya penyerahan.
2. Apabila Pihak Peminta tidak mengambil alih orang yang dicari dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal yang disepakati untuk penyerahan, Pihak Diminta harus segera membebaskan orang tersebut dan dapat menolak

permintaan baru yang diajukan Pihak Peminta untuk pengekstradisian orang tersebut atas tindak pidana yang telah dimintakan ekstradisi.

3. Apabila suatu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan alasan-alasan yang di luar kendalinya, Pihak lainnya harus segera diberitahu. Para Pihak harus menyepakati waktu dan tempat yang baru dan hal-hal relevan untuk pelaksanaan ekstradisi berdasarkan hukum nasional yang berlaku dari Para Pihak. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan ayat (2) Pasal ini harus diberlakukan.

PASAL 12

PENUNDAAN DAN PENYERAHAN SEMENTARA

1. Apabila orang yang diminta sedang dalam proses hukum atau sedang menjalani hukuman pada Pihak Diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk yang dimintakan ekstradisinya, Pihak Diminta, setelah memutuskan untuk mengabulkan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi sampai selesainya proses hukum atau selesainya hukuman tersebut. Pihak Diminta harus memberitahu Pihak Peminta mengenai penundaan tersebut.
2. Apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses hukum pada Pihak Peminta, Pihak Diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang diminta kepada Pihak Peminta, dengan ketentuan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Pihak Peminta menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses hukum terkait.

PASAL 13

PERMINTAAN BERSAMAAN

Apabila permintaan ekstradisi untuk orang yang sama diterima dari dua negara atau lebih, baik untuk tindak pidana yang sama maupun berbeda, untuk menentukan ke

negara mana orang tersebut akan diekstradisi, Pihak Diminta harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. apakah permintaan tersebut dibuat berdasarkan suatu Perjanjian;
- b. tingkat keseriusan tindak pidana;
- c. waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
- d. kewarganegaraan orang yang dicari dan korban;
- e. tanggal masing-masing permintaan dimaksud;
- f. kemungkinan ekstradisi selanjutnya ke negara lain.

PASAL 14

ASAS KEKHUSUSAN

Orang yang diekstradisi berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada Pihak Peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaan ekstradisinya dikabulkan, ataupun orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali:

- a. pihak Diminta telah menyetujui sebelumnya. Untuk tujuan pemberian persetujuan dimaksud, Pihak Diminta dapat mensyaratkan penyerahan dokumen dan informasi yang dinyatakan dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
- b. orang tersebut belum meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut. Namun, jangka waktu tersebut

tidak termasuk waktu apabila orang tersebut tidak dapat meninggalkan Pihak Peminta untuk alasan-alasan di luar kendalinya; atau

- c. setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya, selain tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya.

PASAL 15

PENYERAHAN HARTA BENDA

1. Apabila Pihak Peminta meminta, Pihak Diminta harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, menyita hasil-hasil dan sarana tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya atau ditemukan berada dalam penguasaan orang yang diminta, dan apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, Pihak Diminta harus menyerahkan harta benda tersebut kepada Pihak Peminta.
2. Apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, harta benda sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini tetap dapat diserahkan, bahkan apabila ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang diminta meninggal dunia, hilang, atau melarikan diri, atau alasan lainnya.
3. Pihak Diminta dapat, untuk melaksanakan proses hukum lainnya yang masih berjalan, menunda penyerahan harta benda tersebut di atas sampai dengan selesainya proses tersebut, atau menyerahkan sementara harta benda tersebut dengan syarat bahwa Pihak Peminta menjamin untuk mengembalikannya.
4. Penyerahan harta benda dimaksud tidak boleh merugikan setiap hak yang sah Pihak Diminta atau pihak ketiga lainnya atas harta benda itu. Apabila terdapat hak-hak dimaksud, Pihak Peminta harus, atas permintaan Pihak Diminta segera mengembalikan harta benda yang diserahkan tanpa biaya kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses hukum.

PASAL 16

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

Tiap-tiap Pihak harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, saling memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya terkait dengan tindak pidana untuk ekstradisi yang telah dimintakan.

PASAL 17

TRANSIT

1. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, transit seseorang yang akan diekstradisi dari suatu negara ketiga ke salah satu Pihak melalui wilayah Pihak lainnya akan diizinkan berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui saluran diplomatik atau secara langsung melalui otoritas pusat Para Pihak. Izin transit tidak diperlukan dalam penggunaan transportasi udara dan tidak ada pendaratan yang dijadwalkan di wilayah Pihak yang digunakan sebagai tempat transit.
2. Apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah Pihak tersebut, Pihak tersebut dapat mensyaratkan Pihak lainnya untuk melengkapi permintaan transit sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini. Pihak tersebut dapat menahan orang yang akan diekstradisi tersebut untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sambil menunggu permintaan transit sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya.

PASAL 18

PEMBERITAHUAN HASIL

Pihak Peminta harus segera memberikan informasi kepada Pihak Diminta mengenai hasil persidangan pidana atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang diekstradisi atau informasi mengenai ekstradisi kembali orang tersebut ke negara ketiga.

PASAL 19

BIAYA

Biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi pada Pihak Diminta akan ditanggung oleh Pihak tersebut. Biaya transportasi dan biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh Pihak Peminta.

PASAL 20

KEWAJIBAN INTERNASIONAL

Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak mengenai ekstradisi berdasarkan konvensi internasional atau pengaturan lainnya yang dalam hal ini mereka menjadi pihak.

PASAL 21

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui konsultasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 22

PERUBAHAN

Perjanjian ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama Para Pihak. Perubahan dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian ini.

PASAL 23
KETENTUAN PENUTUP

1. Para pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir.

2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan pun melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan ekstradisi yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DISELESAIKAN di Jakarta pada tanggal dua puluh tujuh Juni, 2013, dalam dua rangkap naskah asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, Viet Nam, dan Inggris, semua naskah sama-sama sah. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggrislah yang berlaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA

UNTUK REPUBLIK SOSIALIS

VIET NAM

Signed

Signed

AMIR SYAMSUDIN

PHAM BINH MINH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MENTERI LUAR NEGERI

MANUSIA



REPUBLIK INDONESIA

**HIỆP ĐỊNH VỀ DẪN ĐỘ
GIỮA
CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A
VÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “các Bên”);

Với mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong việc phòng, chống tội phạm, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và lợi ích của nhau;

Đã thỏa thuận như sau:

**ĐIỀU 1
NGHĨA VỤ DẪN ĐỘ**

Theo quy định của Hiệp định này và phù hợp với pháp luật trong nước của các Bên, mỗi Bên đồng ý dẫn độ cho Bên kia bất cứ người nào có mặt trên lãnh thổ của Bên được yêu cầu mà Bên yêu cầu đề nghị dẫn độ để truy tố, xét xử hoặc thi hành án về một tội bị dẫn độ được thực hiện trước hoặc sau thời điểm Hiệp định này có hiệu lực.



TỘI PHẠM THUỘC TRƯỜNG HỢP BỊ DẪN ĐỘ

REPUBLIK INDONESIA

1. Tội phạm thuộc trường hợp bị dẫn độ là hành vi phạm tội có thể bị xử phạt tù với thời hạn từ một năm trở lên hoặc nghiêm khắc hơn theo quy định pháp luật của cả hai Bên.

2. Hành vi chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt hoặc lập kế hoạch, giúp sức hoặc xúi giục, hướng dẫn hoặc tổ chức việc thực hiện hoặc là người cùng thực hiện hành vi phạm tội được quy định tại khoản 1 Điều này cũng là tội phạm thuộc trường hợp bị dẫn độ.

3. Phù hợp với quy định của Điều này, khi xác định hành vi bị buộc tội cấu thành một tội theo pháp luật của cả hai Bên, không yêu cầu pháp luật của cả hai Bên quy định hành vi bị buộc tội của người đó thuộc cùng một nhóm tội hoặc cùng tội danh. Tất cả các yếu tố của hành vi đó sẽ được xem xét, kể cả trong trường hợp có sự khác nhau giữa các yếu tố cấu thành của tội phạm bị yêu cầu dẫn độ.

4. Nếu yêu cầu dẫn độ liên quan đến nhiều tội và một trong số đó không có hình phạt tù từ một năm trở lên theo pháp luật hai Bên thì việc dẫn độ có thể được chấp thuận đối với tất cả các tội nếu đáp ứng được các yêu cầu khác theo quy định của Hiệp định này và ít nhất một trong số đó là tội phạm thuộc trường hợp bị dẫn độ.

5. Trường hợp dẫn độ một người liên quan đến một tội về thuế, thuế hải quan, kiểm soát ngoại hối hoặc các vấn đề về thu nhập khác thì Bên được yêu cầu không được từ chối dẫn độ với lý do pháp luật của Bên đó không áp dụng cùng loại thuế hoặc thuế hải quan hoặc không quy định về thuế, thuế hải quan hoặc quy chế ngoại hối tương tự như pháp luật của Bên yêu cầu.

6. Không ảnh hưởng đến khoản 4 Điều 3 Hiệp định này, tội phạm sẽ thuộc trường hợp bị dẫn độ theo Hiệp định này, bất kể hành vi của người bị yêu cầu dẫn độ

diễn ra toàn bộ hoặc một phần tại Bên được yêu cầu, khi xem xét tổng thể hành vi phạm tội và hậu quả hoặc hậu quả mong muốn của hành vi đó theo pháp luật của Bên được yêu cầu, đã cấu thành tội phạm thuộc trường hợp bị dẫn độ trong lãnh thổ của Bên yêu cầu.

7. Đối với yêu cầu dẫn độ để thi hành bản án đã được tuyên thì thời hạn còn phải tiếp tục chấp hành hình phạt đối với tội phạm thuộc trường hợp bị dẫn độ không được ít hơn sáu tháng.

ĐIỀU 3 TỪ CHỐI DẪN ĐỘ

1. Dẫn độ sẽ bị từ chối nếu:

a. Tội phạm bị yêu cầu dẫn độ là tội phạm chính trị;

b. Bên được yêu cầu có cơ sở chắc chắn để tin tưởng rằng yêu cầu dẫn độ được đưa ra để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trừng phạt người bị dẫn độ vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, dân tộc, quan điểm chính trị hoặc vì bất kể một trong các lý do nêu trên, người đó bị đối xử không công bằng trong quá trình tố tụng;

c. Tội phạm bị yêu cầu dẫn độ là tội phạm quân sự và không phải là tội phạm theo pháp luật hình sự thông thường;

d. Theo pháp luật của Bên yêu cầu, người bị yêu cầu dẫn độ không thể bị truy tố vì đã hết thời hiệu hoặc không thể thi hành án vì người đó đã được ân xá;

e. Một bản án cuối cùng đã được tuyên đối với người bị yêu cầu dẫn độ về tội phạm bị yêu cầu dẫn độ;

f. Theo pháp luật của Bên yêu cầu, tội phạm bị yêu cầu dẫn độ sẽ bị kết án tử hình, trong khi theo pháp luật của Bên được yêu cầu, tội phạm đó không bị kết án tử hình, trừ khi Bên yêu cầu cam kết nếu người đó bị kết án tử hình thì hình phạt sẽ không được thi hành.

2. Theo quy định của Hiệp định này, các tội sau sẽ không được coi là tội phạm chính trị:

a. Tội xâm phạm tính mạng hoặc thân thể người đứng đầu Nhà nước hoặc người đứng đầu Chính phủ hoặc các thành viên gia đình của người đó;

b. Một tội phạm trong công ước quốc tế mà các Bên là quốc gia thành viên có nghĩa vụ dẫn độ hoặc truy tố người bị yêu cầu hoặc chuyển ngay vụ án đó cho các cơ quan có thẩm quyền của mình để truy tố;

c. Tội phạm liên quan đến khủng bố theo pháp luật của Bên được yêu cầu, tại thời điểm yêu cầu, sẽ không được coi là tội phạm có tính chính trị;

d. Chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt hoặc là đồng phạm trong các trường hợp phạm tội nêu trên.

3. Theo Hiệp định này, các tội xâm phạm nghiêm trọng thân thể con người, tính mạng hoặc tài sản, mặc dù mang động cơ chính trị cũng sẽ không được coi là tội phạm chính trị.

4. Dẫn độ có thể bị từ chối nếu Bên được yêu cầu có quyền tài phán đối với tội phạm bị yêu cầu dẫn độ theo pháp luật quốc gia của Bên được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Bên được yêu cầu sẽ có nghĩa vụ truy tố người bị yêu cầu về tội danh bị yêu cầu dẫn độ tại tòa án của nước mình phù hợp với pháp luật trong nước. Nếu các cơ quan có thẩm quyền của Bên được yêu cầu quyết định không truy tố trong trường hợp

này hoặc việc truy tố là không thể thực hiện được vì bất cứ lý do gì thì yêu cầu dẫn độ sẽ được xem xét lại;

5. Trong các trường hợp ngoại lệ, xét mức độ nghiêm trọng của tội phạm và lợi ích của Bên yêu cầu, Bên được yêu cầu thấy rằng, việc dẫn độ sẽ không phù hợp với các nguyên tắc nhân đạo do hoàn cảnh cá nhân của người bị yêu cầu dẫn độ.

ĐIỀU 4 CÔNG DÂN

1. Theo Hiệp định này, các Bên sẽ không dẫn độ công dân của mình.

2. Nếu việc dẫn độ bị từ chối chỉ vì quốc tịch của người bị yêu cầu dẫn độ thì Bên được yêu cầu, theo đề nghị của Bên yêu cầu, chuyển vụ án đó cho cơ quan có thẩm quyền để truy tố.

3. Theo quy định của Điều này, quốc tịch của người bị yêu cầu dẫn độ được xác định trên cơ sở quốc tịch của người đó vào thời điểm thực hiện tội phạm mà vì đó yêu cầu dẫn độ được đưa ra.

ĐIỀU 5 CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1. Mỗi Bên chỉ định một cơ quan trung ương để thực hiện Hiệp định này.

2. Về phía Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, cơ quan trung ương sẽ là Bộ Luật pháp và Nhân quyền và về phía Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan trung ương sẽ là Bộ Công an.

ĐIỀU 6

YÊU CẦU DẪN ĐỘ VÀ TÀI LIỆU

1. Yêu cầu dẫn độ và tất cả các tài liệu có liên quan sẽ do cơ quan trung ương của một Bên gửi cho cơ quan trung ương của Bên kia thông qua các kênh ngoại giao.

2. Văn bản yêu cầu dẫn độ phải được gửi kèm theo các tài liệu sau:

a. Các tài liệu mô tả về người bị yêu cầu dẫn độ bao gồm: tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, các tài liệu nhận dạng khác, nếu có thể, nghề nghiệp, nơi cư trú, nơi ở tạm thời của người bị yêu cầu dẫn độ, mô tả đặc điểm nhân thân, ảnh, dấu vân tay của người đó nếu có và các thông tin khác có thể hỗ trợ xác định nhận dạng và nơi ở của người đó;

b. Văn bản tóm tắt tình tiết chính của vụ án, mô tả về tội phạm bị yêu cầu dẫn độ bao gồm thời gian và địa điểm thực hiện và hình phạt được quy định với tội đó theo pháp luật;

c. Văn bản trích dẫn các quy định pháp luật xác định tội phạm và hình phạt và các quy định pháp luật liên quan đến thời hạn truy tố hoặc thi hành án tùy vào hoàn cảnh liên quan đến tội phạm đó.

3. Đối với yêu cầu dẫn độ để truy tố, phải gửi kèm theo: lệnh bắt của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để dẫn độ; văn bản đề nghị truy tố hoặc bản cáo trạng đối với người bị yêu cầu dẫn độ về tội danh được nêu trong yêu cầu dẫn độ; và các chứng cứ xác nhận việc chuẩn bị truy tố người bị yêu cầu dẫn độ về tội phạm đó để truy tố.

4. Đối với yêu cầu dẫn độ để thi hành bản án được tuyên đối với người bị yêu cầu dẫn độ, phải gửi kèm bản sao có chứng thực bản án cuối cùng và văn bản thông báo thời gian đã chấp hành hình phạt và thời gian còn phải chấp hành.

5. Yêu cầu dẫn độ theo Hiệp định này phải được ký và đóng dấu bởi cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu.

6. Yêu cầu dẫn độ và tất cả các tài liệu liên quan phải được dịch sang tiếng Anh.

ĐIỀU 7

THÔNG TIN BỔ SUNG

Nếu Bên được yêu cầu cho rằng thông tin được cung cấp kèm theo yêu cầu dẫn độ không đầy đủ để xem xét yêu cầu thì Bên được yêu cầu có thể yêu cầu bổ sung thông tin cần cung cấp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung thông tin hoặc trong khoảng thời gian được các Bên thống nhất.

ĐIỀU 8

CHUYỂN GIAO TỰ NGUYỆN

Nếu người bị yêu cầu dẫn độ trình bày rõ ràng tại phiên tòa trong thủ tục dẫn độ rằng người này tự nguyện để được chuyển giao cho Bên yêu cầu, thì Bên được yêu cầu, căn cứ theo pháp luật quốc gia của mình, có thể chuyển giao người đó nhanh chóng mà không cần thực hiện thêm các thủ tục dẫn độ khác.

ĐIỀU 9

BẮT KHẨN CẤP

1. Trong các trường hợp khẩn cấp, một Bên có thể yêu cầu Bên kia bắt khẩn cấp người phạm tội bỏ trốn để dẫn độ trước khi có yêu cầu dẫn độ chính thức. Yêu cầu này phải được gửi bằng văn bản qua các kênh ngoại giao được quy định tại Điều 5 Hiệp định này, qua Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL hoặc các kênh khác do các Bên thỏa thuận.

2. Yêu cầu bắt khẩn cấp gồm thông tin được quy định tại khoản 2 Điều 6 Hiệp định này, văn bản thông báo về lệnh bắt và văn bản khẳng định rõ sẽ gửi yêu cầu dẫn độ chính thức đối với người đó.

3. Bên được yêu cầu sẽ thông báo ngay cho Bên yêu cầu về kết quả của yêu cầu bắt khẩn cấp.

4. Người bị bắt giữ khẩn cấp sẽ được trả tự do nếu trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày sau ngày bắt giữ, các cơ quan có thẩm quyền của Bên được yêu cầu không nhận được yêu cầu dẫn độ chính thức.

5. Việc trả tự do cho người theo khoản 4 Điều này không cản trở việc bắt giữ lại người đó và bắt đầu thủ tục dẫn độ, nếu sau khi trả tự do cho người đó, Bên được yêu cầu nhận được yêu cầu dẫn độ chính thức.

ĐIỀU 10

QUYẾT ĐỊNH VỀ YÊU CẦU DẪN ĐỘ

1. Bên được yêu cầu sẽ xem xét yêu cầu dẫn độ được đưa ra theo Hiệp định này phù hợp với các thủ tục được quy định trong pháp luật quốc gia nước mình và thông báo ngay cho Bên yêu cầu về quyết định của mình.

2. Nếu Bên được yêu cầu từ chối toàn bộ hoặc một phần yêu cầu dẫn độ thì phải thông báo lý do từ chối cho Bên yêu cầu.

ĐIỀU 11

CHUYỂN GIAO

1. Nếu Bên được yêu cầu chấp thuận yêu cầu dẫn độ thì các Bên sẽ thống nhất về thời gian, địa điểm và các vấn đề khác liên quan đến chuyển giao người bị yêu cầu

dẫn độ. Bên được yêu cầu sẽ thông báo cho Bên yêu cầu về thời gian người bị yêu cầu dẫn độ đã bị giam giữ trước khi được chuyển giao.

2. Nếu Bên yêu cầu không tiếp nhận người bị yêu cầu dẫn độ trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày sau ngày thỏa thuận chuyển giao thì Bên được yêu cầu sẽ trả tự do ngay cho người đó và có thể từ chối xem xét yêu cầu dẫn độ mới của Bên yêu cầu đối với người đó về cùng một tội danh.

3. Nếu một Bên không thể chuyển giao hoặc tiếp nhận người bị yêu cầu dẫn độ trong khoảng thời gian đã thỏa thuận vì các lý do bất khả kháng thì Bên đó phải thông báo ngay cho Bên kia biết. Các Bên sẽ thỏa thuận về thời gian, địa điểm mới và các vấn đề liên quan khác để thực hiện việc dẫn độ phù hợp với pháp luật quốc gia của mình. Trường hợp này được áp dụng quy định tại khoản 2 Điều này.

ĐIỀU 12

HOÃN VÀ CHUYỂN GIAO TẠM THỜI

1. Nếu người bị yêu cầu dẫn độ đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án ở Bên được yêu cầu về một tội phạm khác với tội bị yêu cầu dẫn độ, Bên được yêu cầu có thể, sau khi ra quyết định chấp thuận dẫn độ, hoãn dẫn độ cho tới khi kết thúc quá trình tố tụng hoặc chấp hành xong bản án. Bên được yêu cầu sẽ thông báo cho Bên yêu cầu về việc hoãn dẫn độ.

2. Nếu việc hoãn dẫn độ có thể gây trở ngại nghiêm trọng đến quá trình tố tụng hình sự tại Bên yêu cầu thì Bên được yêu cầu có thể, theo đề nghị của Bên yêu cầu, tạm thời chuyển giao người bị yêu cầu dẫn độ cho Bên yêu cầu nếu không gây cản trở đến các thủ tục tố tụng hình sự đang được tiến hành của Bên được yêu cầu và Bên yêu cầu cam kết giao trả người đó vô điều kiện và ngay lập tức sau khi kết thúc các quá trình tố tụng hình sự có liên quan.

ĐIỀU 13

NHIỀU YÊU CẦU DẪN ĐỘ ĐỐI VỚI MỘT NGƯỜI

Nếu hai hoặc nhiều hơn hai quốc gia cùng yêu cầu dẫn độ đối với cùng một người hoặc về cùng một tội hoặc về các tội khác nhau, khi xem xét các yêu cầu dẫn độ để quyết định việc dẫn độ người này cho quốc gia nào, Bên được yêu cầu sẽ xem xét tất cả các yếu tố có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

- a. Yêu cầu dẫn độ có được lập theo một hiệp định hay không;
- b. Mức độ nghiêm trọng của tội phạm;
- c. Thời gian và địa điểm phạm tội;
- d. Quốc tịch của người bị yêu cầu dẫn độ và người bị hại;
- e. Ngày đưa ra yêu cầu dẫn độ; và
- f. Khả năng dẫn độ tiếp theo cho một quốc gia khác.

ĐIỀU 14

QUY TẮC ĐẶC BIỆT

Người bị dẫn độ theo Hiệp định này sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không phải thi hành án tại Bên yêu cầu về một tội do người đó thực hiện trước khi bị chuyển giao, ngoài tội mà vì đó người này bị yêu cầu dẫn độ hoặc cũng sẽ không bị dẫn độ lại cho quốc gia thứ ba, trừ trường hợp:

- a. Bên được yêu cầu đã đồng ý trước. Để đạt được sự đồng ý đó, Bên được yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp các tài liệu và thông tin được quy định tại Điều 6 Hiệp định này;

b. Người đó không rời khỏi lãnh thổ của Bên yêu cầu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được tự do rời đi hoặc người đó tự nguyện quay trở lại lãnh thổ Bên yêu cầu sau khi rời đi. Tuy nhiên, thời hạn này không bao gồm thời gian người đó không thể rời khỏi Bên yêu cầu vì các lý do bất khả kháng; hoặc

c. Bất kỳ một tội nhẹ hơn nào được đưa ra dựa trên cùng các sự kiện dùng để dẫn độ người này, trừ tội mà vì đó việc dẫn độ không thể được thực hiện một cách hợp pháp.

ĐIỀU 15

CHUYỂN GIAO TÀI SẢN

1. Nếu Bên yêu cầu đề nghị, thì Bên được yêu cầu sẽ, trong phạm vi pháp luật quốc gia nước mình, tạm giữ các tài sản do phạm tội mà có và các phương tiện dùng để phạm tội cùng các tài sản khác để làm bằng chứng được tìm thấy trên lãnh thổ của mình hoặc thuộc sở hữu của người bị yêu cầu dẫn độ và khi chấp thuận dẫn độ sẽ chuyển giao tài sản này cho Bên yêu cầu.

2. Khi chấp thuận dẫn độ, tài sản được quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được chuyển giao, ngay cả khi việc dẫn độ không thể thực hiện được vì người đó chết, mất tích hoặc bỏ trốn hoặc bất kỳ lý do nào khác.

3. Để phục vụ cho bất kỳ thủ tục tố tụng hình sự nào còn chưa được giải quyết, Bên được yêu cầu có thể hoãn việc chuyển giao tài sản được đề cập ở trên cho tới khi kết thúc các thủ tục đó hoặc chuyển giao tạm thời tài sản này với điều kiện Bên yêu cầu cam kết sẽ trả lại tài sản đó.

4. Việc chuyển giao tài sản như trên không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bên được yêu cầu hoặc của bên thứ ba đối với tài sản đó. Khi có các quyền và lợi ích nêu trên, theo đề nghị của Bên được yêu cầu, Bên yêu cầu phải trả lại tài sản

được chuyển giao cho Bên được yêu cầu sớm nhất có thể sau khi kết thúc các thủ tục tố tụng.

ĐIỀU 16

TƯƠNG TRỢ PHÁP LÝ

Mỗi Bên sẽ, trong phạm vi cho phép của pháp luật trong nước, cung cấp cho Bên kia biện pháp rộng rãi nhất để tương trợ pháp lý về các vấn đề hình sự liên quan đến tội phạm bị yêu cầu dẫn độ.

ĐIỀU 17

QUÁ CẢNH

1. Trong phạm vi pháp luật nước mình cho phép, việc quá cảnh người bị yêu cầu dẫn độ đến một Bên từ một nước thứ ba qua lãnh thổ của Bên kia sẽ được phép khi có văn bản yêu cầu gửi qua đường ngoại giao hoặc trực tiếp qua các cơ quan trung ương của các Bên. Không yêu cầu phải xin phép quá cảnh nếu việc vận chuyển được thực hiện bằng đường hàng không và không có lịch trình hạ cánh trên lãnh thổ của Bên kia.

2. Nếu tiến hành việc hạ cánh không dự định trước trên lãnh thổ của Bên kia thì Bên này có thể gửi yêu cầu xin quá cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều này. Bên kia có thể, không trái với pháp luật quốc gia mình, tạm giữ người đó trong khoảng thời gian 72 (bảy mươi hai) giờ trong khi chờ yêu cầu quá cảnh.

ĐIỀU 18

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Bên yêu cầu sẽ thông báo kịp thời cho Bên được yêu cầu về kết quả xét xử hoặc thi hành bản án đối với người bị dẫn độ hoặc thông tin liên quan đến dẫn độ lại người đó cho một quốc gia thứ ba.

ĐIỀU 19

CHI PHÍ

Các chi phí phát sinh trong quá trình dẫn độ tại Bên được yêu cầu sẽ do Bên đó chi trả. Các chi phí về vận chuyển và chi phí quá cảnh liên quan đến chuyển giao hoặc tiếp nhận người bị dẫn độ sẽ do Bên yêu cầu chi trả.

ĐIỀU 20

NGHĨA VỤ QUỐC TẾ

Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng tới các quyền và nghĩa vụ của các Bên liên quan đến dẫn độ theo các điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận khác mà các Bên là thành viên.

ĐIỀU 21

GIẢI QUYẾT BẤT ĐỒNG

Bất cứ bất đồng nào nảy sinh trong việc giải thích hoặc áp dụng Hiệp định này sẽ được giải quyết qua tham vấn giữa các Bên qua các kênh ngoại giao.

ĐIỀU 22

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Hiệp định này sẽ được sửa đổi, bổ sung tại bất cứ thời điểm nào với sự đồng thuận của các Bên. Những sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực theo các thủ tục như thủ tục để Hiệp định này có hiệu lực.

ĐIỀU 23
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Các Bên sẽ thông báo cho nhau về việc hoàn thiện các thủ tục trong nước có liên quan để Hiệp định này có hiệu lực. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày các Bên nhận được thông báo sau cùng.

2. Mỗi Bên sẽ chấm dứt Hiệp định này bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia qua các kênh ngoại giao tại bất kỳ thời điểm nào. Hiệp định sẽ hết hiệu lực sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày nhận được thông báo chính thức đó. Việc chấm dứt Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng tới các yêu cầu dẫn độ được đưa ra trước khi chấm dứt Hiệp định.

Để làm bằng, những người ký tên dưới đây, được Chính phủ của mình ủy quyền đầy đủ, đã ký Hiệp định này.

Làm tại Gia-các-ta, vào ngày hai mươi bảy tháng sáu năm 2013, thành hai bản chính, mỗi bản gồm tiếng In-đô-nê-xi-a, tiếng Việt và tiếng Anh, các bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp nảy sinh bất đồng trong việc giải thích Hiệp định này thì sẽ căn cứ vào bản tiếng Anh.

ĐẠI DIỆN
CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

ĐẠI DIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Signed

Signed

AMIR SYAMSUDIN
BỘ TRƯỞNG
BỘ PHÁP LUẬT VÀ NHÂN QUYỀN

PHẠM BÌNH MINH
BỘ TRƯỞNG
BỘ NGOẠI GIAO



REPUBLIK INDONESIA

**EXTRADITION TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

The Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as "the Parties");

Desiring to make more effective cooperation between the two countries in the prevention and suppression of crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit;

HAVE AGREED as follows:

**ARTICLE 1
OBLIGATION TO EXTRADITE**

Each Party agrees to extradite to the other Party, subject to the provisions of this Treaty and their respective domestic laws, any person who is found in the territory of the Requested Party and sought by the Requesting Party for prosecution, trial, or execution of punishment for an extraditable offence, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 2
EXTRADITABLE OFFENCES

1. An offence shall be an extraditable offence, if it is punishable under the laws of both Parties, by imprisonment for a period of at least one year or by a more severe penalty.
2. An offence shall also be an extraditable offence, if it consists of an attempt or a conspiracy to commit, aiding or abetting, counselling or procuring the commission of or being an accessory to the commission of an offence described in Paragraph 1 of this article.
3. For the purpose of this Article, in determining whether the alleged conduct constitutes an offence under the laws of both Parties, it shall be immaterial whether the laws of both Parties place the alleged conduct of the fugitive within the same category of offence(s) or denominate the offence(s) by the same terminology. The totality of the alleged conduct shall be taken into account, regardless of any differences in the constituent elements of the offence(s) for which the extradition is requested.
4. If the request for extradition includes several offences and some of them are not punishable for at least one year imprisonment under the law of both Parties, extradition may be granted for all offences if they meet the other requirements in accordance with the provisions of the Treaty and includes grant of extradition for at least one extraditable offence.
5. Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, extradition may not be refused on the grounds that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not provide for a tax, duty, customs or foreign exchange regulation of the same kinds as the laws of the Requesting Party.

6. Without prejudice to Article 3(4) of this Treaty, an offence would be extraditable under this Treaty, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party, if under the law of that Party this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extraditable offence in the territory of the Requesting Party.
7. Where the extradition request is aimed at executing a sentence imposed, the sentence remaining to be served in an extraditable offence must not be less than six months.

ARTICLE 3
REFUSAL OF EXTRADITION

1. Extradition shall not be granted where:
 - a. the offence for which the extradition is requested is a political offence;
 - b. the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinion, or that person may, for any of those reasons, be subjected to unfair treatment in judicial proceedings;
 - c. the offence for which extradition is requested is a military offence, which is not an offence under the ordinary criminal law;
 - d. the person sought cannot be prosecuted because of the lapse of time under the laws of the Requesting Party or his sentence cannot be enforced by reason of pardon;

- e. a final judgment has been passed against the person sought in respect of the offence for which the extradition is requested;
 - f. the offence for which extradition is requested, is punishable by death penalty under the law of the Requesting Party, while under the law of the Requested Party such offence is not punishable by death penalty, unless the Requesting Party gives an assurance that if that person is awarded the death penalty, the same will not be carried out.
2. For the purpose of this Treaty, the following shall not be considered as political offences:
- a. an offence against the life or person of the Head of State or the Head of Government or member(s) of their immediate family;
 - b. an offence under any international convention to which the Parties have the obligation by virtue of becoming a State Party thereto, to either extradite or prosecute the person sought or submit the case without undue delay to their competent authorities for the purpose of prosecution;
 - c. an offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested Party, not to be regarded as an offence of a political character;
 - d. an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.
3. Serious offences against the body, person, life and property, even if politically motivated shall not be considered as political offence for the purpose of this Treaty.

4. Extradition may not be granted where the Requested Party has jurisdiction over the offence for which the extradition is requested, under its national law. In such a situation, the Requested Party shall have the obligation to prosecute the person wanted in respect of the offence(s) sought for in its courts in accordance with its laws. If the competent authorities of the Requested Party decide not to prosecute in such a case or the prosecution is not feasible because of whatever reason, the request for extradition shall be reconsidered.
5. When, in exceptional cases, the Requested Party while also taking into account the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party deems that, because of the personal circumstances of the person sought, the extradition would be incompatible with humanitarian considerations.

ARTICLE 4
NATIONALS

1. Neither of the Parties shall be bound to extradite its own nationals under this Treaty.
2. If extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought and she/he is wanted for prosecution in the Requesting Party, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its authorities for prosecution.
3. For the purpose of this article, nationality of the person sought shall be determined on the basis of his/her nationality at the time of the commission of the offence for which extradition is requested.

ARTICLE 5
CENTRAL AUTHORITIES

1. Each Party shall designate a central authority for the purpose of the implementation of this Treaty.
2. For the Republic of Indonesia, the central authority shall be the Ministry of Law and Human Rights and for the Socialist Republic of Viet Nam, the central authority shall be the Ministry of Public Security.

ARTICLE 6
EXTRADITION REQUEST AND DOCUMENTS

1. A request for extradition and all communications relating thereto will be sent by the central authority of a Party to the central authority of the other Party through diplomatic channels.
2. A request for extradition shall be accompanied with the following:
 - a. description of the person sought including the name, age, sex, nationality, other identification documents, if any, occupation, probable location of the person sought, physical description, photographs, fingerprints of the person where available and other information that may help in identifying and locating that person;
 - b. a brief statement of the facts of the case, description of the offence(s) for which extradition is requested, including the time and place of the commission of the offence(s) and the punishment provided for them under the law;
 - c. the text of the legal provisions determining the offence and the punishment and legal provisions regarding limitation of period for

prosecution or enforcement of sentence as the case may be in respect of the offence(s).

3. If the request for extradition relates to the prosecution, it shall be accompanied by: warrant of arrest issued by a court or other competent authorities for the purpose of extradition; a charge sheet or indictment charging the accused with the alleged offence(s); and such evidence as would justify his committal for prosecution.
4. Where the request for extradition relates to the executing of a sentence imposed on the person sought, it shall be accompanied by a certified copy of the final judgment and a statement of the period of sentence which has already been served and remains to be served.
5. A request for extradition under this Treaty shall be signed and sealed by the competent authority of the Requesting Party.
6. Extradition request and all communications related thereto shall be made in the English language.

ARTICLE 7

ADDITIONAL INFORMATION

If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient as to consider the request, the Requested Party may request that additional information be furnished within 30 (thirty) days as of the receipt of the additional information request or within a period as may be agreed between the Parties.

ARTICLE 8
VOLUNTARY SURRENDER

When a person sought explicitly consents before the court during extradition proceedings that he/she volunteers to be surrendered to the Requesting Party, the Requested Party, subject to its national law, may surrender the person as expeditiously as possible without further extradition proceedings.

ARTICLE 9
PROVISIONAL ARREST

1. In urgent cases, a Party may request the other Party for the provisional arrest of a fugitive for the purpose of extradition before a formal extradition request is submitted. Such request may be submitted in writing through the channel provided for in Article 5 of this Treaty, the International Criminal Police Organization – INTERPOL or other channels agreed by both Parties.
2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in Article 6(2) of this Treaty, a statement of the existence of the warrant of arrest and a statement that a formal request for extradition against the person shall follow the provisional arrest.
3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the result of the request for provisional arrest.
4. The person arrested provisionally shall be released if, within a period of 60 (sixty) days of his/her arrest, the competent authorities of the Requested Party has not received the formal request for extradition.
5. The release of the person pursuant to Paragraph 4 of this Article shall not prevent the subsequent re-arrest and institution of extradition proceedings of

that person if the Requested Party has subsequently received the formal request for extradition.

ARTICLE 10

DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION

1. The Requested Party shall consider an extradition request made under this Treaty in accordance with the procedures provided under its national law, and shall promptly inform the Requesting Party of its decision.
2. If the Requested Party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party.

ARTICLE 11

SURRENDER

1. If the request for extradition has been granted by the Requested Party, the Parties shall agree on the time, place and other relevant matters relating to the surrender of the person sought. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the period of time for which the person sought was detained prior to the surrender.
2. If the Requesting Party has not taken over the person sought within 15 (fifteen) days after the date agreed for surrender, the Requested Party shall release that person immediately and may refuse to consider a new request by the Requesting Party for extradition of that person for the offence for which the extradition has been requested.
3. If a Party fails to surrender or take over the person sought within the agreed period for reasons beyond its control, the other Party shall be notified promptly. The Parties shall agree on a new time and place and relevant matters for the

execution of the extradition subject to their national laws. In this case, the provisions of Paragraph 2 of this Article shall apply.

ARTICLE 12

POSTPONEMENT AND TEMPORARY SURRENDER

1. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which the extradition is requested, the Requested Party may, after having made a decision to grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceedings or the completion of the sentence. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the postponement.
2. If the postponement of the extradition may seriously impede the criminal proceedings in the Requesting Party, the Requested Party may, upon request, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party, provided that its ongoing criminal proceedings are not hindered, and that the Requesting Party undertakes to return that person unconditionally and immediately upon conclusion of relevant proceedings.

ARTICLE 13

CONCURRENT REQUESTS

Where requests for extradition of the same person are received from two or more countries, either for the same offence or for different offences, for the purpose of determining to which of those countries the person is to be extradited, the Requested Party shall consider all relevant factors, including but not limited to:

- a. whether the request was made pursuant to a treaty;
- b. the gravity of the offence(s);

- c. the time and place of the commission of the offence(s);
- d. the nationality of the person sought and of the victim(s);
- e. respective dates of the requests; and
- f. the possibility of subsequent extradition to another country.

ARTICLE 14
RULE OF SPECIALITY

The person extradited in accordance with this Treaty shall neither be proceeded against nor subjected to the execution of sentence in the Requesting Party for an offence committed by that person before his surrender other than the offence for which the request for extradition is granted, nor shall that person be re-extradited to a third country, unless:

- a. the Requested Party has consented in advance. For the purpose of such consent, the Requested Party may require the submission of the documents and information mentioned in Article 6 of this Treaty;
- b. that person has not left the Requesting Party within 30 (thirty) days after having been free to do so or that person has voluntarily returned to the Requesting Party after leaving it. However, this period of time shall not include the time during which that person fails to leave the Requesting Party for reasons beyond his control; or
- c. any lesser offence disclosed by the facts for the purpose of securing his return, other than an offence for which extradition could not lawfully be made.

ARTICLE 15
SURRENDER OF PROPERTY

1. If the Requesting Party so requests, the Requested Party shall, to the extent permitted by its national law, seize the proceeds and instruments of the offence and other property which may serve as evidence found in its territory or found in the possession of the person sought, and when the request for extradition is granted, shall surrender these property to the Requesting Party.
2. When the request for extradition is granted, the property mentioned in Paragraph 1 of this Article may nevertheless be surrendered even if the extradition cannot be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought, or any other reasons.
3. The Requested Party may, for conducting any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned property until the conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on the condition that the Requesting Party undertakes to return it.
4. The surrender of such property shall not prejudice any legitimate right of the Requested Party or any third party to that property. Where these rights exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested Party, promptly return the surrendered property without charge to the Requested Party as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 16
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

Each Party shall, to the extent permitted by its laws, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

ARTICLE 17

TRANSIT

1. To the extent permitted by its law, transit of a person to be extradited to one Party by a third State through the territory of the other Party shall be authorized upon request submitted through diplomatic channel or directly through the central authorities of the Parties. Authorization for transit shall not be required when air transport is to be used and no landing is scheduled in the territory of the Party of transit.
2. If an unscheduled landing occurs in the territory of that Party, it may require the other Party to furnish a request for transit as provided in paragraph 1 of this Article. That Party may, in so far as not contrary to its national law, hold the person in custody for a period of 72 (seventy two) hours while waiting the request of transit.

ARTICLE 18

NOTIFICATION OF RESULT

The Requesting Party shall inform the Requested Party promptly about the outcome of the criminal trial or the execution of sentence against the person extradited or information concerning the re-extradition of that person to a third country.

ARTICLE 19

EXPENSES

Expenses arising from the procedures for extradition in the Requested Party shall be borne by that Party. Expenses of transportation and the transit expenses in connection with the surrender or taking over of the extradited person shall be borne by the Requesting Party.

ARTICLE 20
INTERNATIONAL OBLIGATIONS

This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Parties concerning extradition pursuant to international conventions or other arrangements to which they are a party.

ARTICLE 21
SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any differences arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 22
AMENDMENT

This Treaty may be amended at any time by mutual consent of the Parties. Such an amendment shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 23
FINAL PROVISIONS

1. The Parties shall notify each other about the completion of their respective domestic requirements for the entry into force of this Treaty. The Treaty shall enter into force on the date of the receipt of the later notification.

2. Either Party may terminate this Treaty by giving a notice in writing to the other Party through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect after 6 (six) months of the receipt of such notice. Termination of this Treaty shall not affect the extradition requests submitted prior to the termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at Jakarta on this twenty seventh day of June, 2013, in two originals each in the Indonesian, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA

**FOR THE SOCIALIST REPUBLIC
OF VIET NAM**

Signed

Signed

AMIR SYAMSUDIN
**MINISTER FOR LAW AND
HUMAN RIGHTS**

PHAM BINH MINH
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS